



Page 112-126

Received: 15-05-2026
Revised Received: 27-06-2026

Accepted: 15-07-2026
Online Available: 25-07-2026

MENEGOSIASI KESALEHAN: DAKWAH PEREMPUAN DALAM BAYANG-BAYANG PATRIARKI DI RUANG PUBLIK ACEH

NEGOTIATING PIETY: WOMEN'S DAKWAH IN THE SHADOW OF PATRIARCHY IN ACEH'S PUBLIC SPHERE

Aprina, Aprina^{1,a)}, dan Mawardi Siregar²,

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Langsa
Jl. Meurandeh, Kota Langsa

^{a)}e-mail: aprina00345@gmail.com

ABSTRAK

Praktik dakwah perempuan di Aceh dalam konteks struktur sosial dan keagamaan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Kajian ini fokus untuk mengeksplorasi bagaimana pendakwah perempuan menegosiasikan kesalehan sebagai strategi untuk memperoleh legitimasi serta memperluas partisipasi dakwah di ruang publik Aceh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 5 orang da'iyah di Kota Langsa, observasi dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui bagaimana struktur sosial membentuk relasi kuasa gender dalam ruang dakwah, maka kajian ini dianalisis dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby. Untuk melihat praktik kesalehan sebagai strategi negosiasi pendakwah perempuan di ruang publik Aceh, di kaji berdasarkan teori agensi kesalehan Saba Mahmood. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa pendakwah perempuan di Aceh merupakan aktor keagamaan yang aktif menegosiasikan kesalehan, sehingga tetap eksis menyampaikan dakwah di ruang publik. Pendakwah perempuan mengembangkan tiga strategi dakwah yang adaptif terhadap norma patriarki, yaitu pendekatan emosional dan spiritual untuk membangun kedekatan dengan jamaah, penguatan dakwah komunitas perempuan sebagai basis sosial, serta adaptasi komunikasi yang kontekstual terhadap budaya lokal. Kajian ini menegaskan bahwa ruang publik Aceh merupakan arena negosiasi antara agama, budaya, dan relasi kuasa gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.



©2026 – Orasi : Jurnal Dakwah dan Komunikasi by

<http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/index> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Indexed by: SINTA, Google Scholar, Moraref, Portal Garuda, BASE, ROAD, etc

Kata Kunci: Agensi Kesalehan; Negosiasi; Pendakwah Perempuan; Patriarki; Aceh

ABSTRACT

Women's Islamic preaching (dakwah) in Aceh operates within patriarchal social and religious structures that constrain female religious authority in the public sphere. This study examines how women preachers (daiyah) negotiate piety as a strategy for gaining legitimacy and expanding their dakwah participation in public life. Using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews with five daiyah in Langsa City, supplemented by observation and documentary analysis. The study applies Sylvia Walby's theory of patriarchy to analyze how social structures shape gendered power relations in dakwah spaces, alongside Saba Mahmood's theory of pious agency to interpret women's negotiation strategies. Findings reveal that women preachers in Aceh are active religious agents who sustain public visibility through three adaptive strategies: an emotional and spiritual approach to build congregational rapport, community-based dakwah among women as a social foundation, and contextually sensitive communication attuned to local culture. This study contributes to understanding how piety functions not merely as religious devotion, but as a form of agency that enables women to navigate patriarchal constraints within contemporary Muslim public life. Aceh's public sphere thus emerges as a contested arena where religion, culture, and gender intersect.

Keywords: Pious Agency; Negotiation; Women Preachers; Patriarchy; Aceh

1. Pendahuluan

Secara normatif, Islam menegaskan bahwa dakwah dalam maknanya yang paling luas sebagai amar ma'ruf nahi munkar, merupakan kewajiban bagi setiap mukmin tanpa pembedaan gender. Allah SWT dalam Alquran sangat banyak memberikan penjelasan tentang prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam Alquran surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Surah Al Baqarah ayat 30 tentang tugas kekhalifahan, surah Ali Imran 195 menjelaskan tentang kesetaraan dalam meraih prestasi dalam ibadah (Sholihah, 2018).

Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip Hariani (2018), Omid Safi dikutip Falach dan Assya'bani (2020), juga Husein Muhammad (2016) menegaskan bahwa tidak ada ayat Alqur'an yang membatasi peran perempuan di ruang publik. Sebaliknya, Alqur'an banyak mengisyaratkan kesamaan potensi yang dianugerahkan Allah SWT kepada laki-laki maupun perempuan untuk dapat memikul tanggung jawab yang sama di ruang publik.

Namun dalam praktik sosial, legitimasi perempuan sebagai pendakwah (*da'iyah*) di ruang publik masih kerap mendapat perlakuan diskriminatif karena kuatnya budaya patriarki dan juga legitimasi penafsiran agama yang peyoratif (Siregar, 2023). Ketegangan antara prinsip teologis dan

budaya patriarki inilah yang menjadikan isu bagaimana pendakwah perempuan menegosiasikan kesalehan sebagai strategi untuk memperluas partisipasi dakwah di ruang publik Aceh, khususnya di Kota Langsa, Aceh semakin menarik untuk dikaji.

Patriarki dalam konteks masyarakat Aceh beroperasi melalui tiga jalur yang saling menguatkan yaitu, tafsir keagamaan, norma sosial, dan konstruksi moral. Ketiga jalur ini bekerja secara sinergis membentuk patriarki berlapis. Tapi umumnya, norma sosial dan konstruksi moral dilegitimasi oleh tafsir agama yang seolah-olah seluruhnya adalah bagian dari perintah syariat Islam.

Pertama, tafsir keagamaan. Terjadinya diskriminasi terhadap perempuan di ruang publik disebabkan oleh tafsir keagamaan yang dipahami secara tekstual dan parsial oleh masyarakat. Ajaran agama tidak di lihat secara mendasar, sehingga menghasilkan interpretasi yang bias gender (Ismail, 2014). Selain itu, penafsiran agama yang bias gender tidak dapat dipisahkan dari konstruksi patriarki yang dibangun oleh hegemoni intelektual ulama laki-laki (Nurmila, 2015). Dominasi tafsir *male perspective* ini menghasilkan interpretasi keagamaan yang menempatkan perempuan secara sistematis di luar otoritas publik (Chabibi, 2021).

Kedua, melalui jalur norma sosial. Norma sosial yang berlaku pada masyarakat Aceh tidak selalu bersumber langsung dari teks agama, melainkan dari interpretasi kultural yang mengatasnamakan agama. Dalam konteks masyarakat Aceh, perempuan dianggap baik jika mereka difungsikan pada hal-hal yang bersifat domestik. Norma sosial ini terus berkembang, sehingga muncullah norma yang membatasi perempuan tampil di ruang publik (Rasyidin, 2014). Pembatasan tersebut bukan karena dalil keagamaan yang eksplisit, melainkan karena norma sosial tersebut telah dianggap sebagai bagian dari “ajaran syariat” yang tidak perlu dipertanyakan.

Ketiga, melalui jalur konstruksi moral. Ketika syariat Islam diterapkan tahun 1999, banyak orang Aceh melihat cara tersebut merupakan upaya pengembalian Aceh ke masa kejayaannya. Namun demikian, ketika syariat Islam mulai berjalan, syariat cenderung dikonstruksi untuk mengatur moral perempuan. Perempuan yang tidak berjilbab dianggap tidak baik sehingga sering dipermalukan di depan umum (Afrianty, 2013). Perempuan tidak boleh keluar rumah kalau tidak dapat izin suami, meskipun dalam keadaan genting (Fakhriati, 2015). Bahkan perempuan dilarang bekerja malam dan duduk mengangkang ketika berboncengan di atas sepeda motor (Siregar, 2023). Sebaliknya, laki-laki cenderung terlepas dari persoalan-persoalan tersebut.

Pertautan antara tafsir agama yang bias gender, norma sosial yang membatasi gerak perempuan di ruang publik dan konstruksi moral yang menempatkan perempuan sebagai simbol kehormatan, menjadikan pendakwah perempuan berada pada posisi yang dilematis. Pada satu sisi, pendakwah perempuan diuntut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai pendakwah, namun pada sisi lainnya mereka harus diuntut adaptif dengan aturan yang membatasi visibilitasnya di ruang publik. Bila kondisi ini dikaji dari kaca mata Walby (1990), dapat dijelaskan lebih tegas, bahwa praktik patriarki yang memarginalkan pendakwah perempuan di ruang publik Aceh, dikuatkan oleh sistem sosial berupa institusi budaya dan agama.

Namun demikian, para pendakwah perempuan di Aceh terus berupaya membangun praktik dakwah yang adaptif, dengan menegosiasikan identitas keperempuanan, otoritas keagamaan dan tuntutan sosial keagamaan yang berlaku di masyarakat. Gerakan seperti ini digambarkan dalam beberapa kajian yang menunjukkan keterlibatan *tengku inong* (ulama perempuan) Aceh dalam meningkatkan peran dakwah di ruang publik, meskipun dalam konteks yang terbatas (Maulina, Abdullah, Sushartami, & Rahmawati, 2025; Srimulyani, 2016).

Fenomena inilah yang membuat kajian ini semakin menarik dilakukan, karena ada semacam kesadaran teologis pada diri pendakwah perempuan, bahwa dakwah adalah kewajiban universal, sementara secara sosiologis mereka menyadari bahwa melaksanakan aktivitas dakwah tersebut tidaklah mudah, karena berhadapan dengan nilai yang sudah mapan, seperti dominasi patriarki yang memarjinalkan.

Tentu penelitian ini bukan yang pertama. Sejumlah kajian terdahulu pernah dilakukan oleh para sarjana, antara lain Muhsinah (2019) menggambarkan kuatnya perbedaan pandangan masyarakat Aceh dalam melihat kedudukan perempuan dalam posisi strategis di lingkungan Dinas Syariat Islam, sehingga perempuan tidak optimal dalam menjalankan perannya. Rahmawati (2025) menggambarkan kepemimpinan perempuan di Aceh Besar yang mampu menggeser kepemimpinan laki-laki karena perempuan memiliki kapasitas intelektual, modal sosial, dan aktif di ruang publik. El Adibah, *et.all* (2024), Srimulyani (2016) menggambarkan implikasi kreativitas peran ulama perempuan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang menarik di pesantren, meskipun di dominasi oleh budaya patriarki. Panigoro (2025), Lenni Lestari (2022) dan juga Qoirunnisa (2023) menggambarkan upaya perempuan untuk mengatasi hambatan dakwah dan diskriminasi yang bersifat patriarki melalui media online. Kajian lainnya dilakukan oleh Sholihah (2018) dalam menyoroti eksistensi pendakwah perempuan di tengah domestikasi perempuan dalam budaya patriarki.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, terlihat bahwa isu perempuan, patriarki, dan ruang publik di Aceh maupun dalam konteks dakwah telah cukup banyak dibahas. Namun, beberapa penelitian yang telah disebutkan cenderung menyoroti perempuan dalam aspek kepemimpinan, pendidikan, birokrasi dan media dakwah, sementara bagaimana pendakwah perempuan menegosiasikan identitas kesalehan ketika hadir di ruang publik Aceh yang sarat dengan norma patriarkal dan religius, belum banyak dikaji. Inilah yang menjadi distingsi penelitian ini dari kajian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini juga tidak hanya melihat perempuan sebagai korban struktur sosial, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membangun strategi negosiasi sehingga legitimasi religius dan sosial dalam masyarakat Aceh tetap eksis.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan konsep patriarki Sylvia Walby (1990) untuk melihat cara struktur patriarki bekerja melalui norma sosial, tafsir keagamaan dan kontrol moral yang membatasi posisi perempuan di ruang publik Aceh. Kajian ini juga akan dianalisis dengan teori kesalehan agensi (*docile agency*) yang diperkenalkan Saba

Mahmood (2005) sehingga dapat diketahui praktik negosiasi yang dilakukan oleh pendakwah perempuan sebagai agensi kreatif dan aktif yang shaleh.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini di desain dalam bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam cara pendakwah perempuan menegosiasikan kesalahan, sehingga dakwah yang dilakukan tetap eksis di ruang publik yang di bayang-bayangi budaya patriarki dan norma keagamaan yang ketat. Fenomena seperti ini kata Creswell tidak cukup dipahami melalui data statistik *an sich*, tetapi harus ditelusui juga dari pengalaman, praktik sosial, relasi kuasa dan konteks budaya yang melingkupinya (Creswell, 2014).

Studi ini di fokuskan di Kota Langsa dengan jangka waktu penelitian selama 5 bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2026. Informan penelitian berjumlah lima orang pendakwah perempuan yang aktif di ruang publik dan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengalaman dakwah, keterlibatan publik dan posisi sosial-keagamaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi guna menggali pengalaman serta strategi negosiasi dalam menghadapi norma patriarki. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta reflektivitas peneliti (Moleong, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Membangun Hubungan Emosional dan Spritual dengan Jamaah

Kajian-kajian tentang pendakwah perempuan dalam dakwah menunjukkan bahwa meskipun jumlah pendakwah perempuan meningkat, peran mereka di ruang publik masih terbatas, karena konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya otoritas di ruang publik.

Dalam konteks Aceh, beberapa penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki dan nilai-nilai agama yang menyatu membuat masyarakat lebih siap menerima perempuan sebagai “objek dakwah” dari pada “subjek” otoritas. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan, dimana pembatasan peran pendakwah perempuan di ruang publik Kota Langsa terfragmentasi dari praktik dakwah yang di dominasi oleh mayoritas pendakwah laki-laki. Ruang dakwah, seperti masjid, majelis taklim, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), hingga forum dakwah pemerintah umumnya di isi oleh pendakwah laki-laki. Pendakwah perempuan lebih banyak hadir di forum-forum keagamaan berbasis komunitas terbatas, seperti pengajian dan majelis taklim ibu-ibu. Fakta ini menguatkan, bahwa budaya patriarki selalu memiliki stigma negatif terhadap kaum perempuan.

Praktik patriarki seperti ini disebut Walby dengan istilah patriarki publik, karena perempuan di marjinalkan dan ditundukkan melalui segregasi dan subordinasi di ruang publik. Walby juga

memperkenalkan istilah patriarki privat, yaitu patriarki yang berpusat di rumah tangga dengan strategi mengeksklusi perempuan dari ruang publik (Walby, 1990).

Kedua bentuk patriarki tersebut bisa bekerja secara bersamaan. Legitimasi di ruang publik sebagian dibangun atas keberhasilan di ruang domestik. Artinya, seorang perempuan harus terlebih dahulu membuktikan diri sebagai ibu dan istri yang baik sebelum diakui sebagai penceramah (Hidayati, 2015). Wajah patriarki privat sering kali melekat pada diri seorang perempuan meskipun sudah bergerak ke ruang publik. Sebagaimana misalnya pengalaman keberhasilan perempuan salafi di Kota Metro Lampung yang cenderung bersifat tertutup dan dibatasi gerakannya oleh para suami, dan ternyata mampu bergerak maju dan tidak ketinggalan (Khotijah & Madkur, 2018).

Selanjutnya, Walby menegaskan bahwa patriarki bukan sistem tunggal yang monolitik, melainkan terdiri dari enam struktur utama yang berkait kelindan saling memperkuat antara satu sama lain. Keenam struktur tersebut, yaitu produksi rumah tangga, hubungan patriarki dalam kerja berbayar, hubungan patriarki dalam negara, kekerasan laki-laki, seksualitas, dan lembaga budaya termasuk agama, pendidikan dan media.

Dalam konteks pendakwah perempuan Kota Langsa, salah satu dari keenam struktur yang menyebabkan perempuan termarginalisasi di ruang publik adalah konstruksi sosial, termasuk budaya dan agama di tingkat masyarakat. Penelitian ini mengungkap secara nyata dari pengalaman seorang pendakwah perempuan di Langsa yang mendapat penolakan dari perangkat desa dan warga ketika hendak mengisi ceramah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Maulidan di Aceh biasanya adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat di lapangan terbuka dan penceramahnya selalu diisi oleh pendakwah laki-laki. Jamaahnya juga lebih banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketika di wawancarai, informan menggambarkan pengalamannya;

“Saya pernah diundang untuk mengisi ceramah Maulid Nabi di salah satu desa. Namun beberapa perangkat desa yang mayoritas laki-laki, menolak penceramah perempuan sehingga akhirnya saya diganti dengan penceramah laki-laki saja. Saya tidak tau apa alasan penolakan, cuma saya berpikir kalau masyarakat di desa itu ingin menjaga agar perempuan tidak menjadi pusat perhatian di ruang publik” (Masyitah, 2026).

Penolakan yang dialami oleh pendakwah perempuan di Langsa mencerminkan kuatnya norma sosial dan budaya yang seolah-olah meragukan kapasitas perempuan sebagai pemilik otoritas keagamaan di ruang publik. Kondisi ini sejalan dengan pengalaman perempuan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, yang diragukan kemampuannya untuk memimpin. Kuatnya tekanan struktur patriarki dan keagamaan menyebabkan terbatasnya akses perempuan ke dalam ruang publik, padahal perempuan tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan (Hilmiati, Dewi, & Zuherni, 2022).

Penolakan perangkat desa laki-laki terhadap seorang pendakwah perempuan dalam kajian ini, adalah manifestasi patriarki publik yang mengontrol akses perempuan ke forum keagamaan resmi. Maka untuk menghadapi resistensi tersebut, pendakwah perempuan melakukan dakwah dengan pendekatan emosional spiritual. Sepanjang pengamatan yang dilakukan, pendekatan ini dipilih pendakwah perempuan untuk membangun penerimaan sosial di tengah kultur patriarki yang sering

memandang perempuan kurang layak tampil di ruang publik. Pendakwah perempuan menggunakan bahasa dakwah yang lembut dan persuasif, lebih menonjolkan keteladanan moral dan kesalehan personal, serta menjalin kedekatan emosional dengan jamaah.

Pendekatan ini dapat dibaca sebagai bentuk agensi religius yang halus. Pendakwah perempuan aktif beradaptasi dengan norma sosial keagamaan yang berlaku agar tetap di terima oleh masyarakat. Keagenan seperti ini disebut Mahmood (2005) dengan kepatuhan yang saleh. Dalam konteks ini, Mahmood menolak anggapan bahwa kepatuhan perempuan terhadap norma agama identik dengan kepasifan.

Apa yang dikemukakan Mahmood, memiliki benang merah dengan apa yang dijelaskan oleh Walby, bahwa patriarki bukan determinisme yang kaku melainkan bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan. Dalam kerangka inilah strategi emosional spiritual pendakwah perempuan dapat dibaca sebagai negosiasi di dalam struktur. Pendakwah perempuan tidak menantang pembagian peran secara frontal, melainkan mengisi celah yang ditinggalkan sistem patriarkal, yaitu mengisi kebutuhan afektif dan spiritual perempuan yang tidak terakomodasi oleh penceramah laki-laki.

Temuan penelitian ini juga mengungkap, bahwa pendakwah perempuan di Kota Langsa tidak menolak norma agama maupun struktur sosial masyarakat Aceh. Justru dalam menjalankan aktivitas dakwah di ruang publik, pendakwah perempuan selalu mengedepankan ajaran Islam dengan menekankan pada sifat *sabr* (kesabaran dalam mengendalikan diri), *rahmah* (kasih sayang dan empati), serta *shiddiq* (menjunjung tinggi kejujuran). Melalui pendekatan emosional kepada jamaah, para pendakwah perempuan dapat memberikan dakwah dalam situasi yang persuasif dan proporsional. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang informan;

“Insya Allah kalau disampaikan dari hati akan menyentuh hati jamaah. Jadi kita sebagai pendakwah harus menjalin hubungan erat dengan jamaah tanpa harus mengabaikan aturan syariat. Kita harus punya upaya yang adaptif, agar dakwah dapat berjalan dengan baik dan apa yang kita sampaikan itu bisa diterima secara baik oleh jamaah” (Sembiring, 2026).

Informasi di atas menggambarkan bahwa pendakwah perempuan menyadari tugas dakwah adalah kewajiban, dan dalam melaksanakannya tidak boleh melanggar etika keagamaan. Pengalaman ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut Mahmood dengan istilah *ethical self-cultivation* (pembentukan etika diri yang sadar), karena pendakwah perempuan menyampaikan dakwahnya berdasarkan tradisi moral keagamaan. Pendakwah perempuan tidak berdakwah karena terpaksa oleh sistem, tetapi berdakwah karena menghayatinya sebagai ibadah dan kewajiban spiritual yang autentik.

Menghayati aktivitas dakwah sebagai kewajiban spiritual, menyesuaikan gaya bahasa dan materi dakwah bukan karena terpaksa, menunjukkan agensi yang tinggi. Meminjam kaca mata Mahmood, pendakwah perempuan di Langsa dapat dikatakan sebagai agensi kreatif yang shaleh. Selain mampu membaca situasi dan merespons secara tepat situasi jamaah yang mengitarinya, pendakwah perempuan juga dapat berdakwah tanpa harus melanggar nilai yang dianut masyarakat. Hal ini terekam dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang informan;

“Jamaah perempuan yang hadir di majelis ilmu, rata-rata membawa beban kehidupan mereka masing-masing. Maka saya hadir di sana lebih bersifat lemah lembut dan lebih banyak mendengarkan, jadi memang saya buka sesi tanya jawab, apa keluhan mereka, apa kendala yang sedang mereka hadapi” (Syatriah, 2026).

Cara pendakwah perempuan di Langsa dalam menegosiasikan kesalehan melalui pendekatan emosional dan spiritual, menunjukkan kemampuan kreatif mereka dalam memelihara kesinambungan aktivitas dakwah, meskipun dihadapkan dengan ruang yang dibingkai oleh patriarki. Pendakwah perempuan menginternalisasi ajaran agama sebagai panduan yang bermakna dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Jadi bentuk agensi pendakwah perempuan di Langsa sejalan dengan norma sosial dan agama, bukan sebaliknya melawan norma tersebut.

Menginterpretasikan ajaran agama sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari kata Mahmood, merupakan salah satu bentuk kesalehan. Sebagaimana misalnya pengalaman sejumlah perempuan di Indonesia yang taat menjalankan ajaran agama, misalnya memakai jilbab untuk menutup aurat, menjalankan aktivitas domestiknya, taat pada suami, mengurus anak di rumah adalah wujud kesalehan dalam menjalankan perintah agama dan ketaatan kepada Allah SWT (Putri & Poerwandari, 2024).

Dengan demikian, fenomena yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pendakwah, dapat dibaca sebagai bentuk negosiasi non-konfrontatif. Artinya, pendakwah perempuan eksis berdakwah tanpa melawan struktur dominan, melainkan mengisi kebutuhan afektif ruhiyah jamaah yang belum terakomodasi dalam ruang keagamaan dengan berdasarkan petunjuk ajaran agama. Dari sinilah kemudian dipahami, bahwa aktivitas dakwah perempuan di Kota Langsa beroperasi sebagai soft power yang hadir berbasis norma keislaman.

3.2 Penguatan Dakwah Berbasis Jamaah Perempuan

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penguatan dakwah berbasis jamaah perempuan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pendakwah perempuan untuk menjaga kesinambungan dakwahnya di Kota Langsa. Terlihat secara jelas, bahwa komunitas perempuan menjadi basis penting bagi pendakwah perempuan. Aktivitas dakwah tersebut berlangsung di berbagai tempat dan kesempatan, seperti di café, di majelis taklim, perwiritan kaum ibu maupun pengajian rutin mingguan dan bulanan yang dilaksanakan di masjid dan mushalla.

Satu sisi, memilih strategi penguatan jamaah berbasis komunitas perempuan dapat disebut sebagai bagian dari bentuk kesadaran pendakwah perempuan terhadap kapasitas dan potensi yang dimilikinya. Tetapi pada sisi lain, pilihan strategi ini sebenarnya adalah bentuk kesadaran dalam menjaga kesinambungan dakwah dan ketidak inginan mereka untuk melawan ajaran agama. Kondisi ini sama seperti pengalaman yang tergambar dari gerakan aktivis pendakwah perempuan Nurul Jannah al Firdaus, yang lebih memilih memberdayakan komunitas perempuan miskin kota melalui kegiatan tabligh, bimbingan dan pengajaran baca tulis untuk melanggengkan aktivitas dakwahnya (Hasanah, 2013).

Dalam pandangan Walby (1990), komunitas-komunitas dapat dibaca sebagai ruang negosiasi mikro (*micro-spaces of negotiation*) bagi perempuan. Walby ingin membantah secara kritis pandangan Goldberg (1989) yang mengatakan, bahwa penguatan komunitas perempuan justru semakin mengisolasi perempuan di ruang domestik-privat. Senyatanya kata Walby, komunitas-komunitas bagi perempuan tidak hanya mereka terima apa adanya, tetapi mereka secara aktif mengelolanya dengan baik.

Itulah sebabnya, dari observasi yang dilakukan, majelis taklim, pengajian di rumah-rumah dan forum keagamaan majelis taklim perempuan di Kota Langsa, menjadi ruang bagi pendakwah perempuan untuk menyampaikan ceramah agama sekaligus membangun jejaring sosial, saling mendukung dan memperkuat identitas religius. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh salah satu informan;

“Kebutuhan para perempuan terhadap ilmu, terhadap pembinaan dan pengajian itu lebih diutamakan dan lebih dibutuhkan. Komunitas sangat membantu untuk terus menambah ilmu dan saling menguatkan” (Sari, 2026).

Informasi di atas paralel dengan temuan Mahmood tentang perempuan dalam gerakan keagamaan di Mesir yang mengajarkan nilai-nilai kesalehan di majelis taklim. Majelis serupa di Kota Langsa bukan hanya ruang transmisi ilmu, tetapi ruang pembentukan subjek saleh (*pious subjects*) yang sadar dan aktif.

Dari sini dipahami bahwa pendakwah perempuan merupakan agen yang secara aktif memelihara, menghidupkan dan memperluas sistem keagamaan dari internal mereka sendiri. Menurut Abu Lughod (2002), komunitas perempuan Muslim seperti ini tidak hanya pasif tunduk menuruti patriarki, tetapi mereka adalah aktor yang membangun ruang kesadaran dan keberadaan, meskipun itu dalam konteks lokal mereka. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari seorang informan;

“Saya memiliki kelompok binaan khusus perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan sudah berjalan selama kurang lebih Sembilan tahun. Anggota di dalam kelompok itu umumnya adalah ibu-ibu. Kami memanfaatkannya sebagai sarana silaturahmi untuk saling berbagi informasi, ilmu pengetahuan dan saling menasehati dan mendukung untuk kebaikan bersama. Kalau ada salah satu anggota yang sakit akan dibantu, kalau ada anggota keluarganya yang meninggal akan disantuni”. (Rahmawati, 2026).

Informasi di atas memberikan gambaran pemanfaatan komunitas sebagai ruang negosiasi dakwah perempuan. Dengan demikian, istilah bahwa majelis taklim, kelompok pengajian rumahan, majelis perempuan, dianggap sebagai ruang untuk mengisolasi gerak pendakwah perempuan sangat tidak tepat. Meskipun demikian, tetap harus dipahami bahwa aktivitas pendakwah perempuan di Kota Langsa, tidak serta merta menghasilkan kesetaraan, karena pada masyarakat yang berpandangan doktrin patriarki, bagi mereka tetap saja apa yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa adalah bagian dari pengisolasi dari wilayah publik. Sebagaimana misalnya yang dijelaskan Hapke (2013), tentang paradoks gender di Kerala India, yang menunjukkan bahwa tingginya kapasitas

perempuan tidak otomatis menghasilkan kesetaraan otoritas di ruang publik, karena ideologi patriarki bekerja lebih dalam dari sekadar kebijakan formal.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Rahmawati, memberikan indikasi fungsi komunitas pengajian perempuan menjadi ruang penyangga (*buffer space*) bagi seorang pendakwah perempuan untuk membangun otoritas sosial sebelum tampil di ruang publik. Jadi komunitas bagi pendakwah perempuan, berubah wujudnya dari isolasi kepada penguatan legitimasi. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Sinta Nuriyah yang aktif melakukan advokasi terhadap komunitas yang sering mengalami diskriminasi sosial, kekerasan, pelarangan ibadah, hingga penolakan dari mayoritas Muslim. Sinta Nuriyah bukan hanya sebagai aktivis sosial, tetapi sekaligus figur keagamaan perempuan yang memiliki legitimasi moral dan religius untuk berbicara tentang Islam, kemanusiaan, dan keadilan sosial (Widiyanto, 2015).

Dengan demikian, penguatan komunitas perempuan di Kota Langsa tidak sekadar mengisolasi pendakwah perempuan, tetapi tetap menjadi proses negosiasi di mana perempuan membangun pondasi otoritas, sehingga ketika tampil di ruang publik, kehadiran mereka telah dibawa oleh legitimasi sosial keagamaan yang kuat dari dalam komunitas.

3.3. Adaptasi Komunikasi Kontekstual Dengan Budaya Lokal

Dalam masyarakat Aceh yang secara historis menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas keagamaan di ruang publik, kehadiran perempuan sebagai pendakwah tidak serta merta mendapat pengakuan. Pendakwah perempuan harus membangun legitimasinya melalui berbagai cara yang berlaku di masyarakat. Kondisi inilah yang dijelaskan oleh Max Weber, bahwa seseorang yang ingin menjalankan peran kepemimpinan, termasuk kepemimpinan keagamaan harus memiliki kesadaran penuh terhadap tekanan etis dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut. Lebih jauh Weber menegaskan bahwa legitimasi yang sejati tidak dibangun semata dari pengakuan formal, melainkan keteguhan moral dan konsistensi tindakan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial (Weber, 2015).

Berdakwah pada masyarakat yang masih kental pengaruh patriarkinya tentu sangat sulit bagi pendakwah perempuan. Selain harus berhadapan dengan struktural, juga berhadapan dengan kultural di ruang publik. Itulah sebabnya, kemampuan beradaptasi dengan konteks budaya lokal turut menentukan keberlanjutan dakwah yang dilakukan oleh pendakwah perempuan (Ulfa, Kabir, Solihu, & Saari, 2025). Fakta ini juga tergambar dari pengalaman pendakwah perempuan pada komunitas urban Kota Kudus yang melakukan pendekatan berbasis budaya, agar dakwahnya dapat berhasil (Hidayah, Atabik, & Karim, 2025).

Pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan pendakwah perempuan di Kudus, kajian ini juga mengungkap bahwa salah satu strategi yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa untuk menegosiasikan kesalehan adalah membangun komunikasi yang kontekstual, dan beradaptasi dengan budaya setempat. Pilihan untuk menggunakan strategi ini, karena pendakwah perempuan menyadari bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi keadaban, kesopanan dan kehormatan perempuan.

Strategi ini tidak hanya pemilihan aspek bahasa, tetapi mencakup pemilihan materi, gaya penyampaian, intonasi dan ritme interaksi yang disesuaikan dengan latar belakang usia, tingkat pendidikan, serta konteks sosial budaya jamaah. Hal ini terekam dari pengakuan dari seorang informan;

“Dalam berdakwah saya selalu menyesuaikan bahasa, cara penyampaian, menjaga kelayakan busana dan juga mempersiapkan pesan-pesan dakwah yang saya sesuaikan dengan jamaah. Kalau berdakwah di kalangan masyarakat desa, maka bahasa yang saya gunakan sederhana dan mudah di pahami mereka. Kalau berdakwah kepada orang-orang tua saya menggunakan intonasi yang lemah lembut dan materinyapun saya pilih yang mengarah pada mengingat mati, peningkatan amal ibadah” (Rahmawati, 2026).

Berbicara kepada manusia sesuai kadar kemampuan mereka merupakan prinsip komunikasi yang di kembangkan oleh para ulama. Bahkan dalam perspektik komunikasi modern, hal ini sejalan dengan konsep *audience-centered-communication* yang menempatkan karakteristik penerima pesan sebagai titik berangkat dalam merancang strategi komunikasi (Littlejohn & Foss, 2008).

Selain menggunakan pendekatan bahasa, pendakwah perempuan juga melakukan adaptasi budaya. Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang informan;

“Pada saat menyampaikan dakwah, saya selalu menyesuaikan diri dengan jamaah. Saya misalnya kadang-kadang menggunakan bahasa yang bercampur-campur. Kadang bahasa Jawa kalau jamaahnya orang Jawa. Karena kita tidak bisa memaksakan cara kita sendiri terhadap jamaah, jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan latar belakang, baik itu usia, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Maka keragaman jamaah itu menuntut untuk mampu membaca situasi agar dakwah berhasil” (Sembiring, 2026).

Informasi yang dijelaskan di atas menunjukkan adanya kesadaran pendakwah perempuan dalam melihat heterogenitas jamaah, sehingga pendakwah harus lebih memilih menyesuaikan cara berdakwah. Perbedaan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, bahkan budaya turut mendorong pendakwah untuk memilih bahasa, gaya komunikasi, maupun materi dakwah. Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan an sich, tetapi sebagai praktik komunikasi interpersonal yang memerlukan kemampuan adaptasi dan negosiasi sosial.

Strategi komunikasi kontekstual yang dilakukan pendakwah perempuan menunjukkan adanya proses negosiasi melalui budaya lokal. Negosiasi seperti ini dapat membantu keberhasilan seorang pendakwah dalam membangun otoritas keagamaan di ruang publik. Dalam perspektif teori akomodasi komunikasi Howard Giles (2016) disebutkan, bahwa penyesuaian gaya komunikasi, biasanya dilakukan oleh seorang komunikator untuk membangun kedekatan sosial dan penerimaan jamaah.

Praktik dakwah yang dilakukan pendakwah perempuan melalui penyesuaian komunikasi, merupakan satu bentuk strategi agar pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat yang memiliki latar belakang beragam. Adaptasi ini menurut Walby (1990) adalah respons terhadap tekanan struktural patriarki budaya. Namun dalam pandangan Mahmood, adaptasi ini disebutnya sebagai ekspresi agensi normatif pendakwah dalam merespons audiens secara kontekstual dengan menjalankan prinsip dakwah Islam.

Dua pandangan ini menggambarkan kompleksitas posisi pendakwah perempuan yang bernegosiasi, sekaligus berkreasi dalam sistem yang mengitarinya. Dengan demikian, adaptasi komunikasi kontekstual yang dilakukan pendakwah perempuan di Kota Langsa merupakan proses berlapis yang saling menopang dan membentuk strategi negosiasi yang tidak hanya efektif secara komunikatif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial di tengah tekanan patriarkal.

4. Simpulan dan Saran

4.1. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendakwah perempuan di Kota Langsa, Aceh, bukanlah subjek pasif yang tunduk pada tekanan patriarki. Pendakwah perempuan merupakan agen keagamaan yang aktif dan kreatif dalam menegosiasikan kesalehan dalam mempertahankan eksistensi dakwahnya di ruang publik. Melalui analisis berbasis teori patriarki Sylvia Walby dan agensi kesalehan Saba Mahmood, ditemukan tiga strategi negosiasi utama yang dilakukan pendakwah perempuan. Ketiga negosiasi ini berjalan secara sinergis, yaitu: *pertama*, bernegosiasi melalui pendekatan emosional dan spiritual untuk membangun kedekatan dengan jamaah sekaligus mengisi kebutuhan ruhiyah yang tidak terakomodir oleh penceramah laki-laki. *Kedua*, bernegosiasi melalui penguatan komunitas jamaah perempuan, seperti majelis taklim, perwiraan kaum ibu dan pengajian di rumah-rumah. Komunitas ini berfungsi sebagai *buffer space* (ruang penyangga) legitimasi sosial sebelum pendakwah perempuan tampil di forum publik yang lebih luas. *Ketiga*, adaptasi komunikasi kontekstual dan budaya setempat. Ini dilakukan pendakwah perempuan dengan cara menyesuaikan bahasa, materi dan gaya penyampaian sesuai dengan latar belakang usia, tingkat pendidikan dan nilai budaya lokal.

Temuan ini menguatkan, bahwa meskipun budaya patriarki di Aceh bekerja secara berlapis melalui tafsir keagamaan, norma sosial dan konstruksi moral, namun pendakwah perempuan dapat bernegosiasi dengan menjunjung tinggi ajaran Islam itu sendiri. Pendakwah perempuan tidak hanya menjadikan kesalehan sekadar kepatuhan religius, melainkan instrumen agensi sosial yang halus dan berkelanjutan. Dengan demikian, ruang publik Aceh bukan ruang yang sepenuhnya tertutup bagi otoritas keagamaan perempuan. Ruang publik Aceh merupakan arena negosiasi yang dinamis antara agama, budaya, dan relasi kuasa gender.

4.2. Saran-saran

Berdasarkan temuan di atas, dapat disampaikan beberapa saran. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain di Aceh, atau dengan menggunakan pendekatan komparatif antara pendakwah perempuan di Aceh dengan daerah lain di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang variasi strategi negosiasi pendakwah perempuan. Selain itu, penelitian

kuantitatif yang mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan perempuan juga perlu dilakukan untuk melengkapi temuan kajian kualitatif ini.

Bagi praktisi dakwah dan lembaga keagamaan, temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan program pelatihan pendakwah perempuan dalam meningkatkan kompetensi keagamaan, dan juga kecerdasan emosional serta kemampuan komunikasi kontekstual. Bagi pemangku kebijakan, khususnya pemerintah Aceh, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemberian ruang dan pengakuan yang lebih setara bagi pendakwah perempuan di forum-forum keagamaan resmi sebagai bentuk implementasi prinsip dakwah yang inklusif dan berkeadilan gender.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa, khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada dosen pembimbing Dr. Mawardi Siregar M.A, atas arahan, masukan serta bimbingan yang diberikan selama proses penyusunan penelitian. Ucapan terimakasih turut disampaikan kepada seluruh narasumber dan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral selama proses penelitian.

Daftar Pustaka

- Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. *American Anthropologist*, 104(3), 783–790. <https://doi.org/10.1525/AA.2002.104.3.783>
- Afrianty, D. (2013). Local Women's ngos and the Reform of Islamic Law in Aceh: The Case of MISPI. In R. M. Feener, D. Kloos, & A. Samuels (Eds.), *Gender and Power In Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves* (pp. 118–140). New York: Routledge.
- Chabibi, M. (2021). Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perumahan Sosial*, vol 5 No 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.125>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach* (fourth Ed). California: Sage Publication.
- El Adibah, E. D. N., Wicaksono, S., & Al-Asy Ari, M. K. H. (2024). Eksistensi Ulama Perempuan Dalam Budaya Parthiarki di Pesantren. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1). <https://doi.org/10.47498/bidayah.v15i1.2322>
- Fakhriati. (2015). Jati Diri Wanita Aceh Dalam Manuskrip. *Jumantara*, 6(1), 129–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.37014/jumantara.v6i1.312>
- Falach, G., & Assya'bani, R. (2020). Dakwah Muslim Progresif Dalam Menyikapi Kesenjangan Gender. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2). <https://doi.org/10.21093/LENTERA.V4I2.2560>
- Giles, H. (2016). The Social Origins of CAT. In H. Giles (Ed.), *Communication Accommodation Theory: Negotiating Personal Relationships and Social Identities Across Contexts*. United

- Kingdom: Cambridge University Press (CUP).
- Goldberg, S. (1989). the Theory of Patriarchy: *International Journal of Sociology and Social Policy*, 9(1), 15–62. <https://doi.org/10.1108/eb013064>
- Hapke, H. M. (2013). Theorizing Patriarchy: Development Paradoxes and the Geography of Gender in South Asia. *Gender, Technology and Development*, 17(1), 1–29. <https://doi.org/10.1177/0971852412472121>
- Hariani, H. (2018). Tafsir Tematik Kontekstual Atas Hak dan Peran Perempuan Dalam Membangun Dakwah Pada Masyarakat Modern. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 23–37. <https://doi.org/10.14421/JMD.2018.41-02>
- Hasanah, H. (2013). Peran Strategis Aktivis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 473–492. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V7I2.473-492>
- Hidayah, S. N. M., Atabik, A., & Karim, A. (2025). Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Dakwah Islam pada Komunitas Urban Kota Kudus. *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6(01), 35–52. <https://doi.org/10.53678/1MT38R16>
- Hidayati, N. (2015). Beban Ganda Perempuan Bekerja. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), 108–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.516>
- Hilmiati, H., Dewi, E., & Zuherni, Z. (2022). Presepsi Masyarakat Atas Kepemimpinan Perempuan Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 117–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.13140>
- Husein, M. (2016). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta.
- Ismail, N. (2014). Syariat Islam dan Implikasi Penerapannya Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Hak Asasi Manusia Jurnalham.Komnasham.Go.Id*, 10, 43–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.81>
- Khotijah, K., & Madkur, A. (2018). Domestikasi Perempuan Salafi: Konstruksi Sosial Perempuan Salafi di Kota Metro Lampung. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 8(2), 197–212. <https://doi.org/10.15548/JK.V8I2.219>
- Lestari, L. (2022). Pergerakan Kesalehan Online: Islam Publik dan Agensi Keagamaan Perempuan di Masyarakat Aceh Kontemporer. In C. Z. El Bilad (Ed.), *FUAD-International Conference on Islamic Studies* (Vol. 2, pp. 15–30). Palangkaraya.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. a. (2008). Communication Theory and Scholarship. *Theories of Human Communication*, 2–11.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Maulina, P., Abdullah, I., Sushartami, W., & Rahmawati, A. (2025). Disrupting From Within: Teungku Inong and The Reconfiguration of Religious Authority in Aceh's Dayah. *Fenomena*, 24(2), 209–224. <https://doi.org/10.35719/FENOMENA.V24I2.596>
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhsinah. (2019). Peran Perempuan Dalam Pelaksanaan Syariat Islam DI Provinsi Aceh. *Junal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. *Karsa: Journal of Social And Islamic Culture*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Panigoro, A. N. M. (2025). Islam Digital dan Negosiasi Otoritas Keagamaan. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 6(1), 71–90. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v6i1.20916>
- Putri, F. D., & Poerwandari, E. K. (2024). Konstruksi Kesalehan, Posisi dan Agensi Perempuan dalam

- Wacana Keagamaan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 22(2), 193–209. <https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.193-209>
- Qoirunnisa, F. Z., Kurniawan, A. N., Khalida, F. N., Afriyanto, M., & Mustofa, M. Y. (2023). Peran Ulama Perempuan Dalam Pendidikan Islam: Upaya Menembus Patriarki Agama di Era Digital. *Istifkar : Media Transformasi Pendidikan*, 3(2), 122–138. <https://doi.org/10.62509/JI.V3I2.91>
- Rakhmawati. (2025). Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Patriarkal: Dinamika Sosio-Kultural Pemimpin Perempuan di Aceh Besar. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 34(1), 27–48. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i1>
- Rasyidin. (2014). *Politik Gender Aceh; Studi Tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Unima Press.
- Sholihah, F. (2018). Eksistensi Dā'iyah di Tengah Domestikasi Citra Diri Perempuan Shalihah: Perspektif Feminis Eksistensial. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(1), 107–116. <https://doi.org/10.21580/SA.V13I1.2799>
- Siregar, M. (2023). Women and Coffee Shops: Negotiation of The Identity of Modernity and Piety in the Sharia Public Space. *International Journal of Social Science and Business*, 7(1), 115–123. <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V7I1.44732>
- Srimulyani, E. (2016). Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh. In R. M. Feener, D. Kloos, & A. Samuels (Eds.), *Islam and the Limits of the State Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh* (Tird, pp. 141–165). Leiden: Brill.
- Ulfa, F., Kabir, A., Solihu, H., & Saari, C. Z. (2025). The impact of cultural interaction on the effectiveness of muslimah da'wah communication in Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 45(2), 233–248. <https://doi.org/10.21580/JID.V45.2.27718>
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Weber, M. (2015). Politics as Vocation. In D. Waters, Tony; Waters (Ed.), *Weber's Rationalism and Modern Society* (pp. 129–198). New York: Palgrave Macmillan.
- Widiyanto, A. (2015). Female religious authority, religious minority and the Ahmadiyya: The activism of Sinta Nuriyah Wahid. *Journal of Indonesian Islam*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2015.9.1.1-24>

Hasil Wawancara;

- Masyitah, S. Si. (2026). *Hasil Wawancara Bulan Maret di Kota Langsa*.
- Rahmawati. (2026). *Hasil Wawancara Bulan April di Kota Langsa*.
- Sari, A. (2026). *Hasil Wawancara Bulan April 2026*.
- Sembiring, M. (2026). *Hasil Wawancara Bulan April di Kota Langsa*.
- Syatriah, S. (2026). *Hasil Wawancara Bulan Maret di Kota Langsa*.